



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (**Renstra – SKPD**) di susun untuk menentukan dan menetapkan arah kinerja perangkat secara berencana dan terorganisir serta bersinergi antar kegiatan dengan aktor pelaksana kegiatan sehingga arah rencana dapat mencapai sasaran yang maksimal sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Didasari oleh landasan normatif yakni dengan diberlakukannya **Undang undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang *Pemerintahan Daerah* dan **Undang undang Nomor 33 Tahun 2004** tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, memaknai dari dua Undang undang ini sudah cukup memberi roh guna menjawab kebutuhan nyata yang diinginkan oleh daerah – daerah otonomi.

Era otonomi telah berjalan sesuai dengan kehendak Undang undang dan rakyat Indonesia khususnya rakyat di daerah, dengan kesertaan segenap perangkat negara dan daerah hingga otonomi daerah dapat berjalan dengan wajar secara operasionalitatif, sejalan dengan adanya kepentingan dinilai tidak mungkin gaung otonomi ini hanya dijalankan begitu saja secara tidak arif dan profesional, maka hal wajar jika **Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* dan **Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008** tentang *Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penegendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah* di tetapkan.

Hal ini setidaknya untuk inplementasi dengan arah yang sesuai dengan arahan Undang undangnya, maka selanjutnya guna mempertajam maksud dan tujuan serta sasaran kinerja yang berbasis akuntabilitas dipandang perlu menyusun sebuah dokumen khusus sesuai dengan kehendak operasionalnya yakni dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (**Renstra – SKPD**) yang memuat kelengkapan visi dan misi, memuat sasaran dan tujuan, memuat isu – isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, serta strategi khusus dan arahan kebijakan, sehingga diharapkan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (**Renstra – SKPD**) ini dapat menjadi bahan

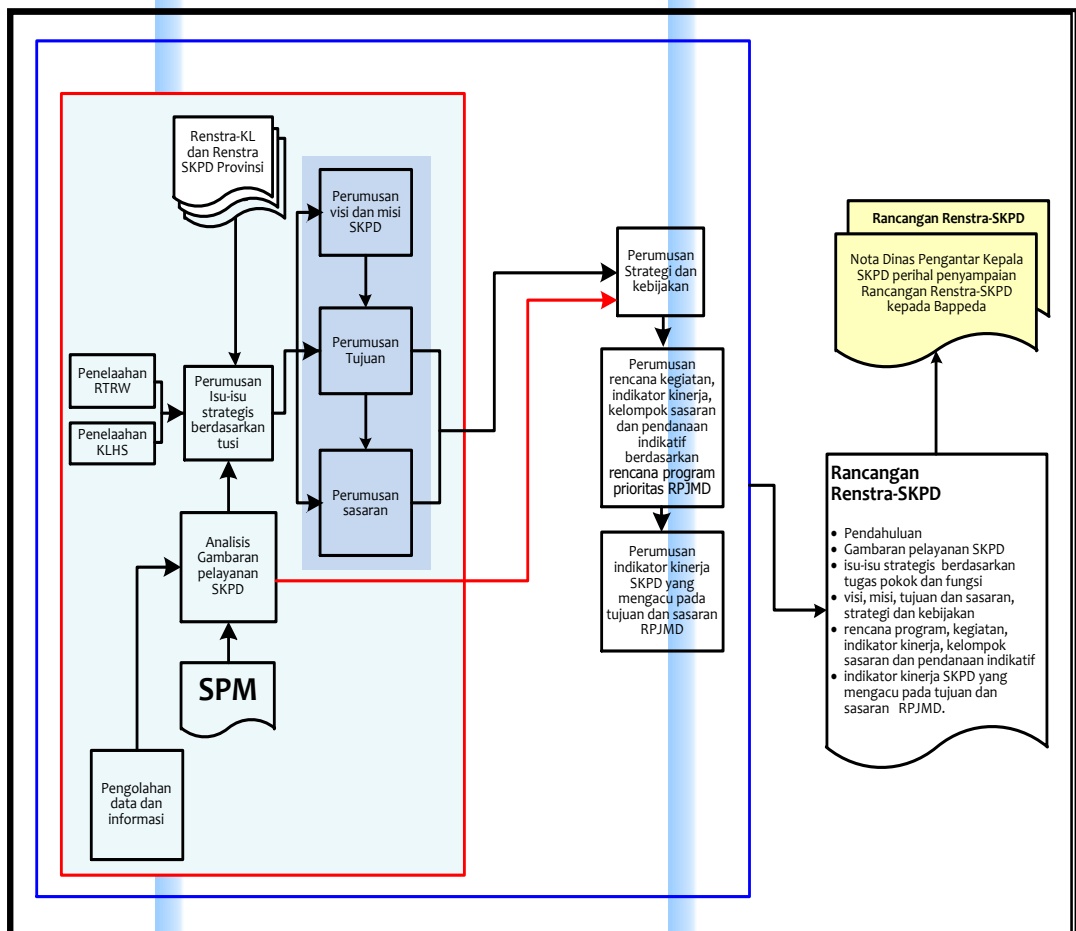


referensi dan sebagai pedoman organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tatanan perencanaan yang tepat sasaran dan tepat tujuan serta tepat manfaat dengan dikondisikan tetap memegang kaidah efisiensi sumber daya secara bijak.

Dengan sekelumit deskripsi yang menjadi dasar dari latar belakang yang ditulis diatas maka Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (**Renstra – SKPD**) Kecamatan Kelay ini disusun.

**Gambar 1**

Hubungan Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (**Renstra – SKPD**) ini meliputi :

- 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ;



- 2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11) Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan Kecamatan Kelay dalam kurun waktu lima tahun yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan perubahan lingkungan strategis



## 2. Tujuan

- 1) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), adalah sebagai sajian yang utuh dari rencana pembangunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Kelay untuk jangka waktu 5 tahun kedepan yakni sampai dengan tahun 2021 mendatang, dimana sajian ini akan dijadikan pedoman untuk mewujudkan tujuan organisasi khususnya dalam pelaksanaan pelayanan dan kegiatan pembangunan dengan segenap potensi yang ada dalam kewilayahan Kecamatan Kelay atau Satuan Organisasi Kecamatan Kelay.
- 2) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), adalah sebagai pedoman menentukan kebijakan kinerja aktor dan subyek kegiatan pembangunan di Kecamatan Kelay secara berencana guna mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tatanan perencanaan yang tepat sasaran dan tepat tujuan serta tepat manfaat dengan dikondisikan tetap memegang kaidah efisiensi sumber daya secara bijak.
- 3) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kelay kurun waktu 5 tahun kedepan yakni sejak tahun 2016 ini sampai dengan tahun 2021 mendatang yang terencana dan terarah secara profesional, tepat sasaran dan tepat tujuan.
- 4) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Kelay khususnya dan Kabupaten Berau pada umumnya.
- 5) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), adalah untuk menjamin tercapainya Pembangunan Sumber Daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- 6) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), adalah guna menciptakan sinergisitas pelaksanaan Pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah.



- 7) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), adalah guna memberikan tolok ukur yakni untuk mengukur dan me-evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD.
- 8) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), adalah sebagai indikator Pengukuran Keberhasilan dan akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kelay.

Dengan menitik beratkan pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagaimana telah diulas pada Bab sebelumnya dalam kupasan dan kandungan maksud dan tujuannya, Renstra – SKPD ini sendiri adalah merupakan pedoman guna menyusun dan menetapkan RENJA SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bersinergi dan untuk menjadikan acuan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), kemudian adanya RENJA SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang disusun secara baku dan relevan akan menjadi pedoman dalam kelangsungan RKA SKPD (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah), dimana hal ini baik itu APBD dan RKA SKPD (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) akan menjadi dasar dasar relevansi yang bersinergisitas dan merupakan satu kedudukan yang berarah rencana sehingga menjadikan dasar dasar struktur Perencanaan Pembangunan Daerah secara Umum.

Keterkaitan tata rencana Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan langkah nyata dalam sistim Struktur Rencana yang baku guna menetapkan arah kinerja perangkat dalam mencapai Tujuan dan Sasaran secara strategis guna menetapkan kondisi Indikator Kinerja yang berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan azas manfaatnya, sehingga Kebijakan dan arahan Program akan menjadi tepat Tujuan dan tepat sasaran pula, kesemuanya bermuara dari amanat Visidan Misi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam hal ini sesuai dengan maksudnya adalah Rencana Strategis – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) Kecamatan Kelay.



## 1.4. Sistematika Penulisan

Kerangka penyajian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Kelay disusun dalam 7 BAB dengan beberapa Sub – sub Bab pada tiap tiap BAB nya, dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

### **BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II     GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Kekuatan dan Kelemahan Internal SKPD

### **BAB III    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV    VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1. Visi dan Misi
- 4.2. Tujuan dan Sasaran
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

### **BAB V     RENCANA      PROGRAM      DAN      KEGIATAN,      INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN      INDIKATIF**

- 5.1. Deskripsi/ Penjelasan
- 5.2. Matriks



**BAB VI    INDIKATOR KINERJA SKPD**

**BAB VII    PENUTUP**

**Lampiran-lampiran**



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KELAY**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kelay**

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang secara langsung bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat menyelenggarakan tugas umum yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
6. Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek;

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; dan



9. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

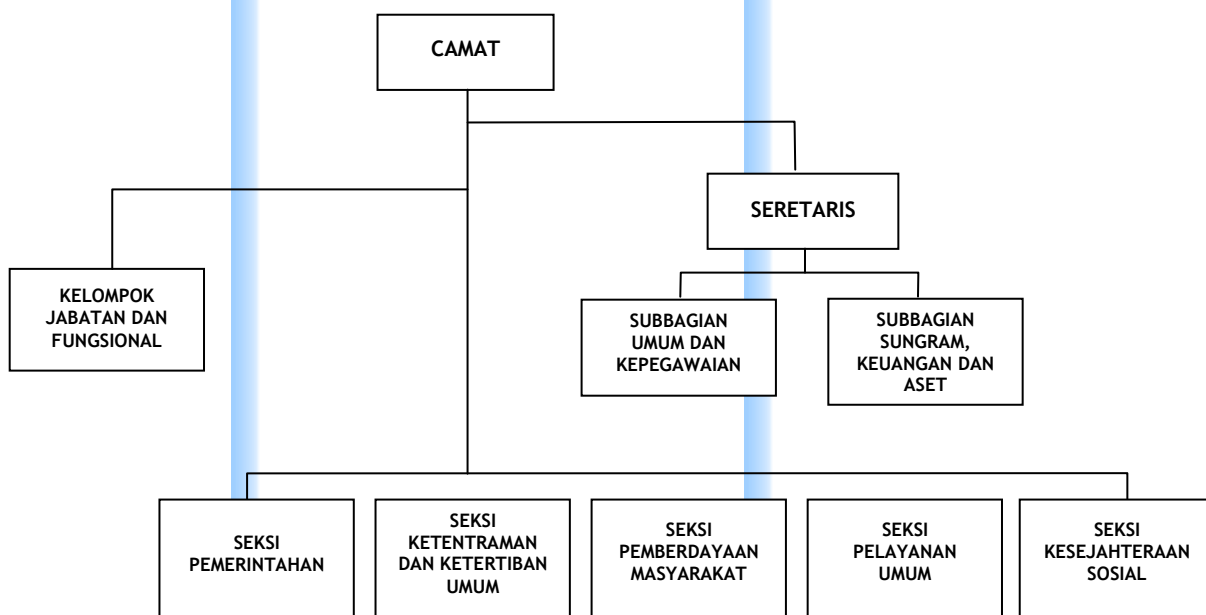
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Kecamatan Tabalar mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- Camat
- Sekretaris
  - ✓ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - ✓ Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset
- Seksi Pemerintahan
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Pelayanan Umum
- Seksi Kesejahteraan Sosial
- Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan kelurahan Kabupaten Berau, Struktur Organisasi Kecamatan Kelay sebagaimana Bagan berikut ini :



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN  
KABUPATEN BERAU**



**2.2. Sumber Daya Kecamatan Kelay**

**2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Kecamatan Kelay Kabupaten Berau pada Tahun 2015 memiliki Sumber Daya Manusia, yakni Aparatur sebanyak 20 (*Duapuluh*) orang, terdiri dari 10 (*sepuluh*) orang Pejabat Struktural dan 10 (*sepuluh*) orang Pegawai Non Struktural, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Jabatan	Jenis Kelamin			Pendidikan Terakhir						Golongan					Diklat PIM			Diklat Fungsional		
		L	P	Jml	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	I	II	III	IV	PTT	II	III	IV	PEM	KEU	KEPEG
1	Struktural																				
	a Camat	1	-	1	-	-	1	-	0	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
	b Sekretaris	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
	c Kasi	5	-	5	-	-	1	-	4	-	-	-	5	-	-	-	3	-	-	-	
	d Kasubbag	3	-	3	-	-	1	-	2	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	
2	Pelaksana																				
	a Seksi Pemerintahan	1	1	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b Seksi Pemberdayaan	-	-	0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	c Seksi Trantib	0	-	0	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d Seksi Pelayanan Umum	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	e Seksi Pendidikan	2	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f Sub bag Sungram	1	-	1	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	g Sub bag Keuangan	1	1	2	-	-	0	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	h Sub bag Kepegawaian	1	1	2	1	-	2	-	-	0	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	i Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Persentase (%)</b>	<b>85</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>48</b>	<b>4,8</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>14,3</b>	<b>23,8</b>	<b>38,1</b>	<b>9,52</b>	<b>14,3</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>80</b>			



Dari Tabel di atas tingkat Pendidikan pegawai paling banyak lulusan SLTA yaitu 48% dari total pegawai. Berdasarkan tingkat golongan maka pegawai golongan tiga paling banyak yaitu sebesar 38,1 %. Pejabat struktural yang ada telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan sesuai dengan eselonnya ada 8 orang dan 2 orang masih belum mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan sesuai dengan eselonnya.

### 2.2.2. Aset yang dikelola

Pada Tahun 2015 Aset dan Modal yang dimiliki Kantor Camat Kelay memiliki nilai sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	NILAI
1	<b>Tanah</b>	55.650.000
2	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.605.806.143</b>
	- Alat-Alat besar	-
	- Alat-alat Angkutan	708.105.000
	- Alat Bengkel & Alat Ukur	157.790.625
	- Alat Pertanian	2.416.150
	- Alat Kantor & Rumah Tangga	645.006.268
	- Alat Studio & Alat Komunikasi	27.722.100
	- Alat-alat Kedokteran	-
	- Alat Laboratorium	64.766.000
	- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	-
3	<b>Gedung &amp; Bangunan</b>	<b>4.213.879.999</b>
	- Bangunan Gedung	4.213.879.999
	- Monumen	-
4	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	-
	- Jalan dan Jembatan	-
	- Bangunan Air/Irigasi	-
	- Instalasi	-
	- Jaringan	-
5	<b>Aset Lainnya</b>	<b>128.550.000</b>
	- Aset Kondisi Rusak Berat	128.550.000
	-Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	- Aset Renovasi	-
	- Aset Tidak Berwujud	-
		-
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.003.886.142</b>



### **2.2.3. Anggaran Kecamatan Kelay**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kelay pada tahun anggaran 2015 dialokasikan dana dari APBD Kabupaten Berau sebesar Rp.4,363,672,000,- termasuk didalamnya gaji dan tunjangan PNS. Guna meningkatkan mutu pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Kelay maka pada tahun tahun berikutnya alokasi dana untuk Kecamatan Kelay agar ditingkatkan.

### **2.3. Profil Kinerja Pelayanan Kecamatan Kelay**

Kecamatan Kelay memiliki posisi kurang strategis secara geografis karena Ibu Kota Kecamatan (Kelay) terletak jauh dari Ibu Kota Kabupaten, yang masih rawan dan kondisi jalan sangat memprihatinkan tidak memungkinkan untuk transportasi umum untuk kegiatan barang dan jasa, hanya sebagian kecil jalan yang memenuhi kriteria yang bagus untuk dilalui, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat di Kampung cukup alot dan kurang strategis untuk kelancaran roda perekonomian jalan sebagai akses utama. Jalan yang menghubungkan Kecamatan Kelay dengan Ibu Kota Kabupaten masih belum bisa dilalui dengan mudah dan baik.

Luas Kecamatan Kelay  $\pm 6.134,60$  Km<sup>2</sup>, terbagi atas 14 (*empat belas*) kampung, yaitu Kampung Merapun, Kampung Merabu, Kampung Mapulu, Kampung Panaan, Kampung Merasa, Kampung Muara Lesan, Kampung Lesan Dayak, Kampung Sido Bangen, Kampung Long Beliu, Kampung Long Duhung, Kampung Long Keluh, Kampung Long Pelay, Kampung Long Lamcin dan Kampung Long Suluy.

Secara demografis jumlah penduduk  $\pm 5.980$  jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk  $\pm 27,9$  jiwa/Km<sup>2</sup>, tahun 2015.

Kehadiran perusahaan-perusahaan Kayu dan perkebunan kelapa sawit, dimana kehadirannya di Kecamatan Kelay adalah merupakan tempat berdomisili dan beroperasi di wilayah Kecamatan Kelay, kondisi ini tentu saja sangat mempengaruhi dinamika pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Kelay dan juga memberikan nilai tambah bagi roda kehidupan perekonomian di wilayah Kecamatan Kelay. Dengan keberadaan Perusahaan dan



perkebunan tersebut maka dinamika pelayanan pada Kecamatan Kelay frekuensinya sedikit meningkat.

Hal ini tergambar dari berbagai pelayanan yang di selenggarakan, pelayanan yang paling menonjol antara lain :

**A. Pelayanan dibidang Kependudukan**

Sebagai dampak dari dinamisnya penduduk di ibu kota Kecamatan Kelay frekuensi pelayanan dibidang kependudukan meningkat dari tahun ke tahun meskipun tidak signifikan. Penduduk ibu kota Kecamatan Kelay sebagian besar penduduk asli dan sebagian adalah pendatang. Frekuensi pindah datang penduduk tinggi, hal ini menyebabkan pelayanan khususnya dibidang kependudukan tinggi pula. Namun demikian penyelenggaraan pelayanan berjalan dengan baik.

**B. Pelayanan dibidang Perizinan SITU**

Seiring dengan makin banyaknya penduduk yang datang dan tinggal di Kecamatan Kelay, maka makin membuka lahan usaha baru bagi masyarakat. Hal ini berdampak juga pada frekuensi pelayanan Ijin Tempat Usaha (SITU).

**C. Pelayanan di Bidang Pertanahan**

Sebagian masyarakat di Kecamatan Kelay khususnya di Ibukota Kelay menjadi termotipasi dalam Pengalihan fungsi lahan. Tidak sedikit lahan yang masih tidur diubah menjadi lahan perkebunan, dan jual beli lahan pertanian. Hal ini berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan adalah Penerbitan Akta Jual beli, Akta Hibah dan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah.

Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kelay selama kurun waktu lima tahun

No.	PROGRAM	CAPAIAN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Penerbitan KTP	1901	1693	3406	3427	3561
2	Penerbitan KK	770	417	493	1689	1753
3	Penerbitan SITU	0	0	0	0	10
4	Penerbitan SPPHAT	0	0	20	11	106
5	Penerbitan SPPT	0	0	0	0	0



6	Penerbitan Akta Jual Beli Tanah	0	0	0	0	0
7	Penerbitan Akta Hibah	0	0	0	0	0
8	Penerbitan Ijin Tambang Gol. C	0	0	0	0	1
9	Penerbitan Rekomendasi Tambang	0	0	0	0	0
10	Penerbitan SKTM	0	0	0	43	166
11	Penerbitan Rekom Nikah	0	7	14	21	23
12	Penerbitan Ijin Keramaian	0	0	0	0	2
13	Penerbitan IMB	5	21	16	12	37

## 2.4 Kekuatan dan Kelemahan Internal SKPD

Beberapa faktor kekuatan dan kelemahan Internal SKPD Kecamatan Kelay teridentifikasi sebagai berikut :

### **KEKUATAN ( Strength : S )**

1. Tersedianya Dana secara berkesinambungan;
2. Tersedianya landasan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau;
3. Tersedianya kuantitas pegawai yang memadai;
4. Tersedianya sarana dan prasarana operasional pelayanan;
5. Terciptanya suasana kondusif ditingkat kecamatan;

### **KELEMAHAN ( WEAKNESS : W )**

1. Kualitas SDM aparatur sesuai bidang tugas belum memadai;
2. Pemahaman pegawai terhadap tupoksi masih rendah;
3. Manajemen pegawai belum maksimal;
4. Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum memadai;
5. Sarana dan prasarana masih belum memadai;

### **PELUANG ( OPPORTUNITY : O )**

1. Pertumbuhan penduduk tinggi;
2. Dinamika Pembangunan masih berkembang;
3. Masyarakat dalam pengurusan perizinan /non perizinan sangat rendah;



4. Adanya Koordinasi dan keterpaduan program dengan Dinas/instansi terkait;

### **TANTANGAN ( THREATS : T )**

1. Mobilitas penduduk sangat rendah;
2. Pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme pelayanan masih rendah;
3. Adanya Kegiatan Masyarakat yang melanggar peraturan daerah;
4. Sumber daya Aparatur Pemerintahan Desa belum memadai;
5. Terbatasnya infrastruktur perdesaan dan sebagian wilayah kecamatan sulit terjangkau transportasi dan terpencil;



## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS

#### BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kelay

Permasalahan strategis bukanlah sekedar permasalahan biasa, oleh karena itu disebut sebagai permasalahan strategis jika memenuhi salah satu diantara lima kriteria sebagai berikut :

- (i) menjadi sebab bagi masalah-masalah lainnya,
- (ii) berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi pembangunan sektor di masyarakat,
- (iii) dapat diselesaikan menggunakan kompetensi, sumber daya dan program SKPD,
- (iv) dapat diselesaikan melalui peningkatan kinerja SKPD, dan
- (v) jika berhasil ditangani, maka akan meningkatkan eksistensi dan peran SKPD dalam pembangunan daerah.

Menggunakan kriteria tersebut, maka permasalahan strategis pada tergambar pada tabel berikut :

**Lembar Penajaman Rumusan Permasalahan Strategis  
Untuk Penyusunan Dokumen Renstra 2016-2021 SKPD  
Kecamatan Kelay**

NO	PERMASALAHAN STRATEGIS	KRITERIA					TOTAL
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1	Peningkatan Pelayanan Publik Urusan (KK/KTP)	2	1	5	3	4	17
2	Peningkatan Pelayanan Publik Urusan (SITU, SIUP, dan IMB)	1	3	5	2	3	14
3	Frekuensi konflik / sengketa lahan sangat tinggi	1	4	5	3	5	18
4	Terbatasnya Sumber Daya Aparatur Desa	5	3	5	4	5	23
5	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Rendah	2	3	3	2	3	13
6	Jalur Transportasi Darat yang Buruk	4	3	4	5	5	21
9	Belum maksimalnya pengawasan terhadap Perda	4	4	2	4	4	18
10	Rawan terhadap Kebakaran Pemukiman/ Lahan	4	4	3	4	5	20



Untuk masing-masing permasalahan strategis, diisi skor untuk setiap kriterianya dalam rentang nilai 1-5.

Dari tabel diatas permasalahan yang paling menonjol dan menjadi perhatian khusus adalah masalah di bidang Kebakaran Lahan, Sumber Daya Manusia Aparatur Kampung dan Transportasi Darat.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Bupati dan Wakil Bupati Berau, periode 2016-2021, menetapkan visi yang akan menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam lima tahun ke depan, yaitu:

**"BERSAMA BANGUN BERAU: SEJAHTERA, UNGGUL, BERDAYA SAING".**

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan agrobisnis dan pariwisata.

Pengembangan agrobisnis merupakan salah satu opsi yang perlu dikembangkan sebagai industri berbasis sumberdaya alam yaitu sektor perkebunan dan pertanian. Agrobisnis memiliki potensi untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja yang mampu menyatukan kegiatan berbasis sentra pertanian dengan bisnis. Selanjutnya, pengembangan agrobisnis akan sangat strategis jika dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengertian terpadu adalah keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir (*backwardandforwardlinkages*), serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. Sedangkan dengan konsep berkelanjutan, diartikan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumber daya dengan melibatkan kelompok/lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek secara terus-menerus.

Dengan dilakukannya pengembangan agrobisnis, maka secara otomatis akan meningkatkan kontribusi sektor pertanian melalui percepatan ketersediaan lahan dan infrastruktur pertanian unggulan. Agrobisnis dinilai mampu untuk



meningkatkan kesejahteraan petani dimana saat ini petani selalu dikonotasikan kurang sejahtera.

Ketika memiliki modalitas dari hasil pembangunan yang ada, lantas fokus pembangunan lima tahun mendatang terwakili oleh tiga kata kunci di dalam visi ini, yaitu:

#### **A.2.1 Sejahtera**

Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Berau yang memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau.

#### **A.2.2 Unggul**

Berau yang unggul mengandung pengertian wilayah Kabupaten Berau memiliki sumber-sumber daya lebih tinggi dari wilayah lainnya dengan masyarakat yang aman dan sejahtera. Menciptakan Berau yang Unggul dan Sejahtera merupakan usaha menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Berau yang unggul dimaksudkan terwujudnya Berau sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian dan budaya unggulan daerah yang didukung oleh kualitas SDM dan sumber sumber daya keunggulan lokal, pengembangan potensi sosial ekonomi Pariwisata Berau sebagai kawasan Wisata terpadu. Berau yang Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta daya saing daerah seluruh masyarakat Kabupaten Berau meliputi peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan IPM (peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli).



### **A.2.3 Berdaya Saing**

Daya saing menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan komparatif secara berkelanjutan. Daya saing merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat lokal untuk memberikan peningkatan standar hidup bagi masyarakat.

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Daya saing juga dapat juga diartikan sebagai kemampuan bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riil-nya.

Rumusan visi di atas terbangun dalam satu kesatuan dan saling melengkapi. Secara substantif, rangkaian visi tersebut bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur, peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta tidak kalah penting, untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mewujudkan kohesi sosial di tengah masyarakat Berau.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta komponen-komponennya agar visi yang ditetapkan berhasil diwujudkan dengan baik. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusunlah misi sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal;
3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi;
4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel;



Dalam mewujudkan visi dan misi ini diperlukan kondisi *good governance* (pemerintah yang baik). Posisi *good governance* (pemerintah yang baik) sebagai prasyarat terlaksananya visi dan misi sehingga membuatnya tidak menjadi misi tersendiri atau bagian parsial lainnya dari visi dan misi.

### **3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA**

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas, distribusi barang dan jasa yang ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu : **Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur.**

Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan dan Kelurahan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.



Pembangunan di Kalimantan Timurl melalui RPJP Daerah dan RPJM Daerah tahun 2016 – 2021 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Berau yaitu :

1. Pengelolaan Kawasan Karst Berkelanjutan.
2. Tenurial dan Zonasi Kawasan.
3. Kontribusi pada Perubahan Iklim.
4. Pembangunan Berkelanjutan melalui Ekonomi Hijau (*Green Governance*).
5. Pengelolaan Hutan dan Lahan Secara Lestari.
6. Pengelolaan Limbah.
7. Pengelolaan Kawasan Pertambangan.
8. Kebakaran Hutan dan Lahan.
9. Pengembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10. Komitmen atas Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi.
11. Peningkatan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan.
12. Penerapan SDG's.
13. Pengembangan Potensi Pariwisata Level Internasional.
14. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional.

Penentuan isu strategis ini berdasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: signifikansi terhadap sasaran pembangunan nasional dan provinsi; memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat dan daerah; mampu menjadi katalisator dan memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; serta kemungkinan untuk dikelola.



### **3.4 Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau yang diimplementasikan dari tahun 2012 hingga 2032, perencanaan pembangunan harus diarahkan menuju *mindset* pembangunan berbasis spasial. Kabupaten Berau yang memiliki daratan seluas 23.558,50 km<sup>2</sup> dan lautan seluas 10.568,85 km<sup>2</sup> (sepanjang 4 mil dari garis pantai pulau terluar), memerlukan perencanaan kewilayahan yang massive dan terstruktur untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Berau memiliki tujuan untuk mewujudkan Kabupaten Berau sebagai kawasan sentra industri dan ekowisata berbasis pertanian dan kelautan yang memiliki daya saing dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung penataan ruang wilayah, meliputi:

1. Pembangunan kawasan sentra industri
2. Peningkatan pengelolaan kawasan ekowisata
3. Pengembangan kawasan pertanian
4. Peningkatan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan
5. Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya
6. Pengelolaan wilayah pesisir melalui keterpaduan ekosistem dan sumber daya secara berkelanjutan
7. Pengembangan fungsi pusat pelayanan yang terintegrasi dengan sistem prasarana wilayah
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Dalam penataan tata ruang terkait sistem pusat kegiatan, Kabupaten Berau membagi menjadi tiga sistem yakni Pusat Kegiatan Wilayah yang terletak di perkotaan Tanjung Redeb; Pusat Kegiatan Lokal yang meliputi tujuh perkotaan; dan Pusat Pelayanan Kawasan yang meliputi 15 perkotaan. Selain itu, terdapat juga sistem perdesaan yang disebut Pusat Pelayanan Lingkungan sebanyak 77 perdesaan yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Berau.

Kabupaten Berau memiliki kawasan-kawasan strategis yang merupakan kawasan prioritas karena memiliki pengaruh yang besar dan penting dalam



lingkup nasional maupun regional daerah baik dalam bidang ekonomi, social, budaya, maupun lingkungan. Kawasan strategis di Kabupaten Berau dibagi menjadi tiga kawasan yakni:

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang meliputi pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit.
2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) berupa kawasan pesisir dan Laut Kepulauan Derawan.
3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang meliputi:
  - Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang meliputi kawasan *Heart Of Borneo* (HOB), pesisir dan laut kepulauan Derawan, pesisir dan laut kepulauan Maratua, konservasi laut Pulau Semama dan Sangalaki, hutan lindung Lesan, taman-taman/obyek wisata alam, dan kawasan karst;
  - Kawasan strategis untuk kepentingan social ekonomi yang meliputi kawasan KTM Labanan, konsesi pertambangan batubara, pusat industri perkebunan, dan kawasan industri Mangkajang;
  - Kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam yang meliputi Pulau Kakaban, pesisir dan kepulauan Blambangan dan Sambit, pesisir dan kepulauan Bilang-Bilang dan Pulau Mataha, dan pesisir dan kepulauan Manimbora dan Balikukup; serta
  - Kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Berau berupa banda udara HANKAM di Pulau Maratua.

Terkait pariwisata, berdasarkan RTRW Kabupaten Berau tahun 2012, pengembangan pariwisata melalui perwujudan kawasan pariwisata dilakukan dengan:

- Pengembangan penyediaan fasilitas pariwisata
- Pengembangan promosi pariwisata
- Pengembangan pusat-pusat oleh-oleh khas daerah
- Pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar obyek pariwisata
- Pengembangan kapasitas kelembagaan pariwisata



Wisata yang dikembangkan meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan/binaan manusia. Masing-masing wisata yang dikembangkan beserta lokasinya sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Wisata Alam
  - a) Pengembangan Wisata Bahari
    - Kecamatan Pulau Derawan;
    - Kecamatan Maratua;
    - Kecamatan Biduk-Biduk;
    - Kecamatan Batuputih, dan
    - Kecamatan Talisayan.
  - b) Pengembangan Wisata Sejarah
    - Kecamatan Gunung Tabur;
    - Kecamatan Sambaliung;
    - Kecamatan Tanjung Redeb; dan
    - Kecamatan Teluk Bayur
  - c) Pengembangan Wisata Alam/Ekowisata
    - Kecamatan Kelay; dan
    - Kecamatan Segah
- 2) Pengembangan Wisata Budaya
  - a) Wisata Budaya Banua
    - Kecamatan Gunung Tabur; dan
    - Kecamatan Sambaliung.
  - b) Wisata Budaya Dayak
    - Kecamatan Kelay; dan
    - Kecamatan Segah
  - c) Wisata Budaya Bajau
    - Kecamatan Derawan; dan
    - Kecamatan Maratua.
- 3) Pengembangan Wisata Buatan/Binaan Manusia
  - a) Wisata buatan/ binaan Tangab, dan Danau Tumbit di Kecamatan Teluk Bayur
  - b) Wisata buatan/ binaan Bendungan Merancang, Sungai Ulak di Kecamatan Gunung Tabur



- c) Wisata buatan/ binaan Air panas Biatan, di Kecamatan Biatan
- d) Wisata buatan/ binaan Makam Raja Alam, di Kecamatan Batu Putih;  
dan
- e) Wisata buatan/ binaan Arung jeram, di Kecamatan Kelay dan Segah.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan External (ALE) sangat berpengaruh terhadap dinamika pelaksanaan program dan Kegiatan. Untuk itu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau harus mengenal kondisi-kondisi elemen, internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) Opportunity (Peluang) dan Threat (Tantangan/ancaman) (SWOT). Analisis SWOT ini dimaksud untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensi serta skala prioritas.

Berdasarkan **ALI** dan **ALE** maka ditentukan strategi yang untuk dapat mengidentifikasi isu-isu strategis.

Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Strategi S + O (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)
  - a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Pegawai , untuk melaksanakan tugas-tugas pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat.
  - b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
  - c. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
  - d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah atau swasta dalam rangka pelaksanaan program
2. Strategi S+T (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)
  - a. Mempertahankan Disiplin pegawai dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik
  - b. Meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur dan mekanisme pengurusan perizinan



- c. Meningkatkan Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah
  - d. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan menuju kedesa-desa
  - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Strategi W + O (Meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang)
- a. Meningkatkan kemampuan pegawai melalui Diklat atau Bimtek
  - b. Meningkatkan kuantitas pegawai sesuai dengan bidang tugas
  - c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan
  - d. Meningkatkan kerjasama dengan insatnsi pemerintah atau swasta untuk mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana umum
4. Strategi W+T (meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman)
- a. Mengoptimalkan Pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksinya.
  - b. Mengoptimalkan Penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk mengatasi kesulitan operasional.

Berdasarkan strategi-strategi tersebut diatas maka disimpulkan isu strategis Kecamatan Kelay dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pengelolaan pegawai yang benar, Pemberian Diklat/Bimtek kepada pegawai sesuai Tupoksi dan Penataan pegawai harus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Penetapan SPP dan SOP dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Penetapan ini sangatlah penting karena Standar Pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan maka harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dapat terwujud.
3. Peningkatan Pengetahuan kepada masyarakat dalam memahami prosedur dan tatacara pengurusan.
4. Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah.
5. Peningkatan Infrastruktur Perdesaan.
6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.



## **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN KELAY**

### **4.1 Visi dan Misi**

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Kecamatan Kelay Kabupaten Berau sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintahan Kabupaten Berau perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat.

Sehubungan dengan itu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana Kecamatan Kelay akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Berau yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Berau 2016-2021 dalah **"BERSAMA BANGUN BERAU: SEJAHTERA, UNGGUL, BERDAYA SAING"** . Berdasarkan visi tersebut maka dirumuskan *Visi Kecamatan Kelay* sebagai berikut :

***"Melalui Pelayanan Prima Yang Profesional  
Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan  
Berwibawa Menuju Masyarakat Kelay Yang Sejahtera"***

Visi tersebut mengandung makna bahwa :

Kecamatan Kelay sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik atau Pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Kelay kepada masyarakat, merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan /atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Kecamatan Kelay.



Kecamatan Kelay berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan atau bahkan pelayanan yang diberikan diatas standar pelayanan yang ditetapkan.

Dengan demikian Pelayanan prima yang diberikandiharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat, Atas Pelayanan yang diselenggarakan harapan selanjutnya Kecamatan Kelay menjadi salah satu instansi pemerintah yang dapat menciptakan “Good Governance” yaitu pemerintahan yang baik dan dinamis yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelay.

Pemberdayaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas dan mendorong timbulnya dedikasi berdasarkan prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa dihargai dan diberi kesempatan mengekspresikan diri yang kemudian menimbulkan rasa kesejahteraan bagi masyarakat tersebut.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan *misi* sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Sejahtera.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kelay**

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organizer.

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan mengfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.



#### 4.2.1 Tujuan dan Sasaran untuk mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan Misi Kesatu : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

**Tujuan :**

- Meningkatkan kualitas tata administrasi dan keuangan yang baik  
Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah
- Meningkatkan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Terciptanya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Terlaksananya Koordinasi pemeliharaan Sarana dan Prasarana pelayanan umum
- Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
- Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya.

**Sasaran :**

- Meningkatnya kualitas tata administrasi dan keuangan
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
- Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah
- Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran.
- Meningkatnya stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.
- Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- Meningkatnya Layanan terhadap masyarakat.



**Tabel 4.2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas tata administrasi dan keuangan yang baik	Meningkatnya kualitas tata administrasi dan keuangan Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Terselenggaranya pelayanan administrasi dan keuangan
2.	Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai Jumlah Aparatur yang mendapatkan Diklat
3.	Meningkatkan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang sinergi
4.	Terciptanya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkungan	Angka gangguan keamanan dan konflik menurun Lingkungan yang bersih
5.	Terlaksananya Koordinasi pemeliharaan Sarana dan Prasarana pelayanan umum	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Tingkat Partisipasi Masyarakat Perdesaan dalam proses pembangunan Tingkat Kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan
6.	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	Terselenggaranya pemerintahan kampung yang berkualitas
7.	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya	Meningkatnya Layanan terhadap masyarakat	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

#### 4.2.2 Tujuan dan Sasaran untuk mewujudkan Misi Kedua

Dalam mewujudkan Misi Kedua : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Sejahtera, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

**Tujuan :**

- Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan



**Sasaran :**

- Meningkatnya Keberdayaan masyarakat Kampung.

**Tabel 4.2.2**  
**Tujuan,Sasaran dan Indikator Kinerja**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan partisipasi publik dalam proses Pembangunan	Meningkatnya Keberdayaan masyarakat desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keberdayaan masyarakat

### 4.3 Strategi dan Kebijakan

#### 4.3.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Kelay dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Mengembangkan kualitas pelayanan masyarakat;
2. Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait;
3. Membangun sistem layanan pengaduan.

#### 4.3.2 Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal

yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Kelay Timur sebagai berikut:



1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
3. Pengembangan data base Kecamatan;
4. Pembentukan tim / satgas layanan pengaduan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem pelayanan pengaduan; serta
6. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah.

**Tabel 4.2.2**

**Hubungan Tujuan dan Sasaran dengan Startegi dan Kebijakan**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM  Presentasi keluhan yang ditindaklanjuti	Mengembangkan kualitas pelayanan masyarakat  Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait  Membangun sistem layanan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"><li>• peningkatan peran dan fungsi Kecamatan dan Kampung</li><li>• Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana</li><li>• pengembangan data base Kecamatan</li><li>• Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat</li><li>• Mengembangkan sistem pelayanan pengaduan</li></ul>
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Nilai swadaya masyarakat	Memperkuat fasilitas kerjasama Kecamatan dengan kampung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah</li></ul>



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF**

Sesuai dengan panduan Permendagri 54 Tahun 2010, Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Kantor Kecamatan Kelay Tahun 2016-2021 harus relevan dengan Program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021 (Tabel 5.1), agar Program dan Kegiatan yang dijalankan selama lima tahun kedepan dapat membantu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Berau.

Dari penetapan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Kecamatan Kelay menetapkan beberapa program dan kegiatan. Program dan Kegiatan beserta Indikator dan Pendanaan Indikatifnya dapat dilihat pada tabel matriks yang terlampir.



## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KELAY YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Penentuan indikator kinerja SKPD sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh SKPD yang berkaitan dan relevan dengan program-program RPJMD, dengan demikian implementasi tugas pokok dan fungsi SKPD yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kelay tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021.

Tugas pokok yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Kelay meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Pembina penyelenggaraan pemerintahan kampung dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kecamatan Kelay melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Berau untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek;

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;



- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaran; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Pemerintah Kecamatan Kelay menyelenggarakan fungsi :

- 7. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 8. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 9. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 10. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 11. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- 12. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 13. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat di laksanakan pemerintahan Kampung atau kelurahan.
- 14. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Mencermati Tupoksi tersebut diatas, maka kinerja hasil pelayanan SKPD yang diharapkan adalah dapat memberikan pelayanan perizinan maupun non perizinan dengan sebaik-baiknya sesuai target yang telah ditetapkan.

Tolak ukur hasil kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas maupun ketepatan rumusan program yang ditetapkan untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran RPJMD dapat dilihat dalam Tabel 6.1. Lebih lanjut, dalam upaya penilaian kinerja pembangunan nasional sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010, Kecamatan Kelay mempunyai peran untuk mewujudkan indikator kinerja pembangunan seperti tertera pada Tabel 6.2 (Lampiran I Permendagri 54 Tahun 2010).



**Tabel 6.1.**  
**Perumusan Indikator Kinerja Hasil**  
**Pelayanan SKPD**

<b>Sasaran dalam RPJMD yang sesuai dengan pelayanan SKPD</b>	<b>Indikator Kinerja Hasil Pelayanan</b>	<b>Program dalam Renstra SKPD</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data kependudukan yang valid</li><li>• Peningkatan sarana operasional penanggulangan kebakaran</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Penataan Administrasi Kependudukan</li><li>2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran</li></ol>
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana prasarana operasional yang memadai	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li><li>2. Program Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</li></ol>
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Frekuensi pembinaan, monitoring, pengawasan yang diselenggarakan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</li><li>2. Program Peningkatan Disiplin</li><li>3. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</li><li>4. Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</li><li>5. Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perkada</li><li>6. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</li></ol>
4. Meningkatnya partisipasi publik	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</li><li>2. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</li></ol>



**Tabel 6.2.**  
**Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

1	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	$\frac{\text{Jumlah bangunan ber – IMB}}{\text{Jumlah bangunan}}$
2	Rasio Tempat Usaha yang memiliki SITU/Ijin HO	$\frac{\text{Jumlah Tempat Usaha Ber SITU}}{\text{Jumlah Tempat Usaha}}$
3	Rasio Usaha Tambang Galian C Ber Ijin	$\frac{\text{Jumlah Usaha Tambang Galian C yang ber Ijin}}{\text{Jumlah Usaha Tambang}}$
4	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	$\frac{\text{Jml penduduk usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jml penduduk usia > 17 atau telah menikah}}$
5	Kepemilikan Kartu Keluarga	$\frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki KKx 100\%}}{\text{Jumlah KK}}$
6	Kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah Penduduk berKTP}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100\%$
7	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yg diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$
8	Penegakan PERDA	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100\%$
9	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	$\frac{\text{Jumlah mobil pemadam kebakaran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
10	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	$\frac{\text{Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1 jam setelah pengaduan)}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}}$
11	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	$\frac{\text{Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik}}{\text{Jumlah seluruh pemerintahan desa}} \times 100\%$

Berdasarkan tabel tersebut di atas direncanakan target pelayanan per tahun selama lima tahun periode tahun 2016-2021 sebagaimana tabel 6.3.



Tabel 6.3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal 2016	Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Bangunan berIMB	Obyek	10	15	25	30	50	70
2	Tempat Usaha yang ber Ijin	Obyek	10	17	50	50	40	70
3	Usaha Tambang yang ber ijin Galian C	Obyek	0	5	6	15	10	20
4	Penduduk ber KTP	Orang	2.500	3.500	4.000	5.000	6.500	7.000
6	Kepala Keluarga ber KK	KK	750	800	2.000	2.300	2.500	6.000
7	PMKS yang mendapat Bantuan	RTS	450	450	450	450	450	450
8	Penegakan Perda	Obyek	5	4	3	3	2	8
9	Cakupan Wilayah Pelayanan Pemadaman Kebakaran	Desa	9	9	9	9	9	9
10	Cakupan sarana dan prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang baik	Desa	9	9	9	9	9	9



## **BAB VII PENUTUP**

Dokumen Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan yang dibuat untuk jangka waktu lima tahun, dalam hal ini Renstra SKPD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berlaku untuk setiap tahun anggaran selama kurun waktu lima tahun, selain itu Renstra SKPD juga berfungsi sebagai piranti untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan.

Memperhatikan begitu sentralnya peran Rencana Strategis Kecamatan dalam segala gerak langkah, maka menjadi kewajiban seluruh jajaran Kecamatan Kelay untuk dapat memahami dan melaksanakan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Kecamatan Kelay.

CAMATKELAY

Drs. Anang Ardiansyah  
Pembina  
NIP. 19641201 199703 1 003

**Tabel 5.1**  
**Indikasi Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**  
**Untuk Mewujudkan Misi Kesatu**

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaannya (000)											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				<b>486.095.000,00</b>		<b>496.095.000</b>		<b>878.925.000</b>		<b>714.000.000</b>		<b>1.003.000.000</b>		<b>3.578.115.000</b>				
Meningkatkan kualitas tata administrasi dan keuangan yang baik	Meningkatnya kualitas tata administrasi dan keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi dan keuangan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	200 lembar	300 lembar	2.000.000	300 lembar	2.000.000	300 lembar	3.000.000	350 lembar	3.000.000	400 lembar	3.500.000	1850 lembar	13.500.000				
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana Kebutuhan Komunikasi, Listrik, Internet dan Air	12 bulan	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	15.000.000	60 bulan	57.000.000				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional untuk kendaraan roda dua	10 unit	10 unit	139.500.000	10 unit	139.500.000	10 unit	209.000.000	10 unit	175.000.000	10 unit	190.000.000	50 unit	853.000.000				
					Jumlah kendaraan dinas/operasional untuk kendaraan roda empat	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		5 unit					
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan	14 orang	14 orang	80.797.000	14 orang	80.797.000	20 orang	51.000.000	20 orang	80.000.000	20 orang	95.000.000	88 orang	387.594.000				
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor	1 unit	4.500 m2	3.000.000	4.500 m2	3.000.000	4.500 m2	13.000.000	4.500 m2	5.000.000	4.500 m2	6.000.000	4.500 m2	36.000.000				
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah alat perbaikan peralatan kerja	3 jenis	21 unit	2.000.000	21 unit	2.000.000	21 unit	13.000.000	21 unit	4.000.000	21 unit	5.000.000	105 jenis	26.000.000				
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis kebutuhan alat tulis kantor	30 jenis	30 jenis	15.598.000	30 jenis	15.598.000	31 jenis	25.000.000	31 jenis	20.000.000	31 jenis	27.500.000	153 jenis	103.696.000				
				Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	6000 lembar	6000 lembar	2.000.000	6000 lembar	2.000.000	6500 lembar	6.000.000	6500 lembar	6.000.000	6500 lembar	10.000.000	31500 lembar	26.000.000				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen listrik	15 ruang	15 ruang	1.500.000	15 ruang	1.500.000	15 ruang	8.325.000	15 ruang	3.500.000	15 ruang	5.000.000	75 ruang	19.825.000				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	2 jenis	0	2 jenis	0	2 jenis	64.000.000	2 jenis	35.000.000	2 jenis	40.000.000	10 jenis	139.000.000				
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan Rumah Tangga	1 jenis	1 jenis	2.400.000	1 jenis	2.400.000	6 jenis	13.200.000	5 jenis	15.000.000	5 jenis	20.000.000	18 jenis	53.000.000				
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Surat Kabar	2 jenis	2 jenis	-	2 jenis	-	2 jenis	-	2 jenis	6.000.000	2 jenis	6.000.000	10 jenis	12.000.000				
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan jamu makanan dan minuman	750 kotak	750 kotak	40.000.000	750 kotak	45.000.000	750 kotak	90.000.000	850 kotak	60.000.000	850 kotak	80.000.000	3950 kotak	315.000.000				
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terkelaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	5 kali	5 kali	15.000.000	5 kali	20.000.000	10 kali	90.000.000	15 kali	30.000.000	20 kali	150.000.000	55 kali	305.000.000				
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terkelaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	100 kali	100 kali	50.000.000	100 kali	50.000.000	100 kali	92.000.000	100 kali	75.000.000	100 kali	150.000.000	500 kali	417.000.000							
	Penyediaan Jasa Adm/Teknis Kantor	Jumlah tenaga penyediaan jasa adm/teknis kantor	5 orang	5 orang	122.300.000	5 orang	122.300.000	5 orang	189.400.000	5 orang	186.500.000	5 orang	200.000.000	25 orang	820.500.000							
Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>																		
				Pengadaan Meubelur	Jumlah Kebutuhan Mebeleur yang tersedia					2 unit	15.000.000					10 unit	25.000.000	10 unit	25.000.000			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah jabatan yang dipelihara											2 unit	15.000.000	2 unit	25.000.000			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Staf	Jumlah Rumah Dinas Staf yang dipelihara	8 unit					8 unit	5.000.000	8 unit	10.000.000	8 unit	15.000.000	8 unit	30.000.000				
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dan Pendopo yang dipelihara	2 unit					2 unit	10.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	25.000.000	2 unit	55.000.000				
Meningkatkan Disiplin Aparatur didalam berpakaian	Meningkatnya Disiplin Aparatur didalam berpakaian	Jumlah aparatur dalam memenuhi kedisiplinan dalam berpakaian		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>																		
				Pengadaan Pakelan Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan					22 stel	16.500.000					23 stel	13.500.000	23 stel	30.000.000			
				Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu (hitam&putih)	Jumlah pakaian khusus yang diadakan											23 stel	13.500.000	23 stel	13.500.000			
Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah	Jumlah Aparatur yang mendapatkan Diklat		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>																		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur mengikuti Bimtek	5 orang				3 orang	9.000.000	4 orang	35.000.000	5 orang	40.000.000	12 orang	84.000.000					
Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sosialisasi kinerja SKPD	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sosialisasi kinerja SKPD yang benar dan tepat waktu	Terciptanya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sosialisasi kinerja SKPD yang benar dan tepat waktu		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>																		
				Sosialisasi Kinerja Program SKPD	Jumlah Pameran yang diikuti	1 paket				1 paket	20.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	50.000.000	2 paket	100.000.000					
				Penyusunan laporan capaian Kinerja dan iddisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	6 jenis	6 jenis	5.000.000	6 jenis	5.000.000	6 jenis	27.000.000	6 jenis	5.000.000	6 jenis	5.000.000	30 jenis	47.000.000				
				Musrembang Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Musrembang Tingkat Kec					14 kampung	23.000.000	14 kampung	38.000.000	14 kampung	40.000.000	14 kampung	101.000.000					
Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Kampung serentak		<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KAMPUNG</b>																		
				Pemilihan Pelantikan dan Pembinaan Kepala kampung	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Kampung serentak					2 kampung	21.475.000											
<b>JUMLAH</b>								<b>491.095.000</b>	<b>501.095.000</b>	<b>1.025.900.000</b>	<b>862.000.000</b>	<b>1.218.000.000</b>	<b>4.045.115.000</b>									

**Tabel 5.1**  
**Indikasi Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**  
**Untuk Mewujudkan Misi Kedua**

										PROGRAM PENINGKATAN PERAN DAN PELAYANAN KECAMATAN		60.000.000		55.000.000		990.160.000		955.000.000		1.015.000.000		3.075.160.000				
Mewujudkan Partisipasi masyarakat di dalam setiap gerak pembangunan	Meningkatkan Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan	Jumlah Usulan yang terakomodir serta jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi didalam pembangunan									Operasional Pemberdayaan Perempuan Kecamatan	Jumlah Kampung yang dibina PKK	14 kampung	14 kampung	20.000.000	14 kampung	30.000.000	14 kampung	100.000.000	14 kampung	40.000.000	14 kampung	50.000.000	14 kampung	240.000.000	KECAMATAN KELAY
											Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah seleksi Kafilah yang mengikuti kegiatan MTQ	40 orang	40 orang	25.000.000	35 orang	5.000.000	35 orang	40.000.000	35 orang	40.000.000	35 orang	45.000.000	180 orang	155.000.000	
											Forum Komunikasi Kecamatan Sehat	Jumlah Kegiatan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat					5 paket	20.000.000	5 paket	25.000.000	5 paket	30.000.000	15 paket	75.000.000		
											Pembinaan Olahraga yang Berkembang dimasyarakat	Jumlah kegiatan Olahraga yang diikuti			-		-		-		-	20 orang	20.000.000	20 orang	20.000.000	
											Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan	Jumlah kegiatan Ekspose Kebangsaan Kecamatan	100 orang	150 orang	15.000.000	150 orang	20.000.000	200 orang	20.000.000	200 orang	30.000.000	200 orang	30.000.000	900 orang	115.000.000	
											Monitoring dan Pengendalian Penggunaan Dana Kampung	Jumlah Money ADK 14 kampung						14 kampung	146.600.000	14 kampung	150.000.000	14 kampung	160.000.000	42 kampung	456.600.000	
											Kegiatan Pendamping SIGAP	Jumlah Kampung yang Mendapat Pendampingan SIGAP			-		-	14 kampung	663.560.000	14 kampung	670.000.000	14 kampung	680.000.000	42 kampung	2.013.560.000	
<b>JUMLAH</b>											<b>60.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>990.160.000</b>	<b>955.000.000</b>	<b>1.015.000.000</b>	<b>3.075.160.000</b>										